

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tersurat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pembangunan sebagai salah satu cermin pengamalan Pancasila terutama sila kelima, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia (Saerofi, 2005).

Arah dan kebijakan pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu penting dan sangat krusial untuk mewujudkan tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah sehingga keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan merata di seluruh tanah air. Hal tersebut tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat tetapi memerlukan waktu, karena itu yang paling penting adalah semua upaya harus diarahkan sedemikian rupa sehingga proses-proses dan pelaksanaan pembangunan setiap

tahun makin mendekati pada tujuan nasional (GBHN 1998, poin F: penjelasan ke-10).

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut akan mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi (Saerofi, 2005).

Menurut Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi.

Salah satu indikator untuk menentukan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah dengan melihat data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku ataupun atas dasar konstan. Dalam PDRB ini dapat dilihat sektor-sektor ekonomi yang potensial yang dimiliki daerah tersebut. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus memanfaatkan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah tersebut, khususnya sektor-sektor ekonomi yang potensial bagi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor-sektor ekonomi yaitu sektor pembentuk angka PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengembangan sektor ekonomi potensial diartikan sebagai upaya untuk mengubah atau menaikkan keadaan yang ada pada sektor-sektor ekonomi potensial, guna meningkatkan PDRB (Nurani, 2005).

Sebagai salah satu propinsi di Indonesia, Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang cukup besar dan sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh luas daratan sebesar 20.153,15 km² dan

luas perairan laut sebesar 29.159,04 km², membuat propinsi Nusa Tenggara Barat berada pada posisi yang strategis. Hal ini dikarenakan propinsi Nusa Tenggara Barat berada pada lintas perhubungan Banda Aceh – Atambua yang secara ekonomis menguntungkan, merupakan lintas perdagangan Surabaya – Makasar dan Sebagai daerah lintas wisata antara Pulau Bali, Komodo dan Toraja yang merupakan Segitiga Emas Pariwisata Indonesia (Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat). Dengan keuntungan letak yang strategis tersebut, propinsi Nusa Tenggara Barat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan memanfaatkan sektor-sektor ekonomi yang potensial bagi kenaikan PDRB. Berikut ini adalah tabel tentang kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB di Propinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000.

Tabel 1
Perkembangan Kontribusi PDRB Sektoral Propinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2001-2007 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Th. 2001	Th. 2002	Th. 2003	Th. 2004	Th. 2005	Th. 2006	Th. 2007
1	Pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan	3,533	3,577	3,743	3,841	3,878	3,990	4,106
2	Pertambangan & penggalan	3,867	4,002	4,012	4,368	4,201	4,080	4,192
3	Industri pengolahan	529	560	597	635	681	700	770
4	Listrik, gas & air bersih	36	39	40	43	45	50	56
5	Konstruksi	814	852	902	952	1,003	1,067	1,148
6	Perdagangan, hotel & restoran	1,648	1,733	1,825	1,930	2,050	2,209	2,386
7	Pengangkutan & komunikasi	857	915	968	1,033	1,108	1,191	1,276
8	Keuangan, real estate & jasa preusan	423	466	563	654	691	745	813
9	Jasa-jasa	1,379	1,403	1,425	1,474	1,527	1,571	1,623

Sumber: BPS, *Pendapatan Regional Propinsi Nusa Tenggara Barat*, tahun 2008

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi propinsi Nusa Tenggara Barat disumbang oleh 9 sektor, yaitu pertanian,

peternakan, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estate dan jasa perusahaan; jasa-jasa servis.

Sektor ekonomi potensial yang menyumbang angka PDRB terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian, dengan nilai kontribusi terhadap PDRB rata-rata di atas Rp 4 miliar pada tiap tahunnya. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat yang menurut fisiografi terdiri dari daerah datar, landai, bergelombang dan bergunung-gunung.

Sektor kedua yang memberikan kontribusi pada PDRB dengan rata-rata sebesar Rp 3 miliar adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Dengan letak geografis antara $08^{\circ} 10'$ – $09^{\circ} 05'$ Lintang Selatan dan $115^{\circ} 46'$ – $119^{\circ} 05'$ Bujur Timur, memungkinkan propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah yang agraris sehingga sangat cocok untuk daerah pertanian, kehutanan dan tersedianya bahan makanan untuk ternak. Selain itu, luas perairan sebesar 29.159,04 km² dapat dimanfaatkan untuk membudidayakan berbagai jenis ikan yang juga dapat meningkatkan sektor perikanan.

Sektor ketiga yang memberikan kontribusi pada PDRB yaitu dari sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Antara tahun 2001-2004, sektor ini menyumbang PDRB rata-rata sebesar Rp 1 miliar, dan pada tahun 2005-2007 meningkat menjadi Rp 2 miliar. Letak propinsi Nusa Tenggara Barat yang strategis memungkinkan untuk munculnya usaha perdagangan yang memicu

tumbuhnya tempat-tempat untuk menginap atau beristirahat sambil menikmati makanan. Letak strategis ini dikarenakan propinsi Nusa Tenggara Barat berada pada lintas perhubungan Banda Aceh – Atambua, lintas perdagangan Surabaya – Makasar dan lintas wisata antara Pulau Bali, Komodo dan Toraja.

Sektor keempat yang memberikan kontribusi pada PDRB rata-rata sebesar Rp 1 miliar adalah dari sektor jasa-jasa. Sektor jasa ini berkaitan dengan sektor perdagangan, hotel dan restaurant. Dengan semakin banyaknya hotel dan restoran didirikan, maka semakin banyak pula orang-orang yang menggunakan jasa-jasa tersebut. Hal ini menyebabkan sektor jasa dapat memberikan kontribusi pada PDRB dengan angka yang cukup tinggi.

Untuk lima sektor ekonomi lainnya rata-rata memberikan kontribusi pada PDRB di bawah Rp 1 miliar, terutama sektor listrik, gas dan air bersih yang memberikan kontribusi terkecil pada PDRB propinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di propinsi Nusa Tenggara Barat antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Perkembangan PDRB Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001-2007
Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan (Persen)
2001	13,085	-
2002	13,544	3,51
2003	14,073	3,91
2004	14,928	6,08
2005	15,184	1,69

2006	15,604	2,77
2007	16,369	4,90

Sumber: BPS, *Pendapatan Regional Propinsi Nusa Tenggara Barat*, tahun 2008

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa PDRB propinsi Nusa Tenggara Barat mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Sektor ekonomi yang menyumbangkan nilai PDRB tertinggi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian (BPS, 2008). Selain itu, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2007 tercatat sebesar 4,90 persen menurut harga konstan. Secara riil pertumbuhan ekonomi tahun 2007 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2006 tumbuh sebesar 2,77 persen. Namun pertumbuhan ekonomi tahun 2007 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2004 yang mencapai 6,08 persen.

Dengan melihat besar kecilnya kontribusi yang diberikan masing-masing sektor pada PDRB seperti tercantum dalam tabel 1, peneliti ingin meneliti lebih lanjut, apakah sektor-sektor ekonomi tersebut merupakan sektor yang potensial dan harus dikembangkan di propinsi Nusa Tenggara Barat, agar kesejahteraan masyarakat tercapai. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui lebih lanjut sektor-sektor ekonomi mana saja yang dapat menjadi sektor basis di propinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengambil judul” Analisis Sektor-Sektor Ekonomi Potensial dengan mengambil studi kasus di Propinsi Nusa Tenggara Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sektor-sektor ekonomi apakah yang paling strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di propinsi Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi apa saja yang paling strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di propinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sektor-sektor ekonomi di propinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi apa saja yang potensial di propinsi Nusa Tenggara Barat.